

**DAMPAK RELOKASI PUSAT PEMERINTAHAN TERHADAP EFESIENSI
PELAYANAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

Ridwan Toni Purba¹, Marihot Manullang², Robert Tua Siregar³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun ditinjau dari; aspek keterjangkauan pelayanan (*affordability*), aspek kecukupan pelayanan (*recoverability*), aspek kesesuaian pelayanan (*replicability*), dan aksesibilitas terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Simalungun. Dengan menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini. Maka relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun memberi pengaruh terhadap pelayanan masyarakat dan Pengembangan wilayah. Dari hasil analisis Chi Square diperoleh hasil adalah variable pelayanan yang paling dipengaruhi adalah variabel independen yang paling utama dipengaruhi oleh relokasi di Kecamatan Raya dengan nilai Chi Square 47.367. Dominan diakibatkan timbulnya aktivitas - aktivitas masyarakat di Pusat Pemerintahan tersebut. Fasilitas umum pemerintahan dilakukan pembangunan fisik dan non fisik yang dipengaruhi oleh relokasi memperoleh nilai Chi Square 44.049. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sector pelayanan yang mengikuti relokasi untuk mengantisipasi perkembangan wilayah Simalungun.

Kata Kunci: Pengembangan Wilayah, Pelayanan Masyarakat

ABSTRACT

The impact of the relocation of the Simalungun Regency government center in terms of; aspects of service affordability (affordability), aspects of service adequacy (recoverability), aspects of suitability of services (replicability), and accessibility to regional development of Simalungun Regency. By using a combination of qualitative and quantitative methods in this study. Then the relocation of the Simalungun Regency government center has an influence on community services and regional development. From the results of the Chi Square analysis, the result is that the service variable that is most affected is the independent variable that is most affected by relocation in Raya District with a Chi Square value of 47,367. Dominance caused by the emergence of community activities in the Central Government. Government public facilities carried out physical and non-physical development which were affected by relocation obtained a Chi Square value of 44,049. This condition indicates that the development of the service sector following the relocation is to anticipate the development of the Simalungun area

Keyword : Regional Development, Community Service

PENDAHULUAN

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebelum tahun 2008 Ibukota Kabupaten Simalungun berada dalam wilayah kota Pematang Siantar. Pada tahun 2008 Ibukota Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di wilayah Pematangsiantar di pindahkan ke Pematang Raya di Kecamatan Raya.

Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun dari Wilayah Kota Pematangsiantar ke Pematang Raya di Kecamatan Raya mengacu pada konsep keadilan dan pemerataan. Pada tanggal 28 Juli 1999 Pemerintah menyetujui perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1999 tentang pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemindahan daerah Ibukota Kabupaten Simalungun tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 Oktober 1996. Pada tanggal 23 Juni 2008 Pematang Raya resmi menjadi Ibukota Kabupaten Simalungun, maka sejak saat itu seluruh aktifitas roda pemerintahan Kabupaten Simalungun berpusat di Kota Pematang Raya. Dimana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1999 tersebut dibutuhkan waktu hampir sembilan tahun. Dan sejak saat itu kota Pematang Raya yang sebelumnya hanya merupakan sebuah ibukota kecamatan Raya kini juga meningkat statusnya menjadi Ibukota Kabupaten Simalungun.

Perpindahan Ibukota Kabupaten bukan sekedar persoalan pusat pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktifitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Dari sisi nasional, hal ini sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dengan merencanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang (Purba, 2006)

Untuk meraih pembangunan yang nyata di Kabupaten Simalungun dibutuhkan suatu konsep perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran tentang pilihan tujuan yang di prioritaskan, pengalokasian sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini akan menunjang roda pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan efisien serta penetapan langkah yang lebih baik di masa yang akan datang. Tujuan dilaksanakan pembangunan pada hakekatnya hanyalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kesejahteraan tersebut sangat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami peningkatan yang sangat berarti, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari - hari. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan tercapai melalui proses pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan, baik berupa pembangunan ekonomi, fisik, sosial dan pembangunan sarana lainnya.

Dari sektor lain kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun demikian efek positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada kemampuan sistem perekonomian tersebut untuk menyerap dan secara produktif mempekerjakan tambahan angkatan kerja (Todaro, 2000).

Sejak tahun 2008 terutama di kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kota Pematang Raya telah menjadi sebuah kawasan yang berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan fisik dengan berbagai

aspek perluasannya. Karena Kota Pematang Raya merupakan simpul pusat pemerintahan dan pusat pelayanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten Simalungun. Perkembangan Kota Pematang Raya yang pesat berakibat pada peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya, sehingga kebutuhan akan sumber daya dan ruang turut meningkat. Selain itu, dengan perannya saat ini sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan, maka keberadaan Kota Pematang Raya bagi masyarakat simalungun sangat penting. Untuk saat ini dan di waktu yang akan datang Kota Pematang Raya menjadi tumpuan perkembangan Kabupaten Simalungun. Dengan demikian, penggunaan lahan di Pematang Raya khususnya di kompleks perkantoran Kabupaten Simalungun dan sekitarnya dalam pemanfaatannya harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Kompleks perkantoran Kabupaten Simalungun saat ini menjadi bagian dari perkembangan kota yang pesat ditandai dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan berdiri yang bergerak dalam bidang perdagangan dan pelayanan jasa, yang berarti semakin berkurangnya lahan pertanian, pemukiman yang semakin padat, serta ramainya aktifitas di sepanjang jalan dari desa Damei Raya hingga ke Raya Tengah. Untuk mengarahkan perkembangannya di masa yang akan datang sebuah kota yang memiliki prospek perkembangan yang pesat memerlukan suatu konsepsi seluruh perubahan yang berkelanjutan, yang mampu menampung arus perkembangan dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang pembangunan dan perkembangan Kota Pematang Raya harus terjamin sesuai dengan tujuan yang ingin di capai sekaligus terjamin tidak akan timbul dampak terhadap lingkungan sekitar. Kota Pematang Raya memiliki prospek perkembangan ekonomi ditinjau dari potensi yang dimilikinya, seperti letak lokasi yang cukup strategis menghubungkan langsung Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Karo, tingkat keamanan kota yang sudah kondusif dan dukungan wilayah sekitarnya. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana memanfaatkan potensi tersebut menjadi peluang yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat setempat.

Kehadiran pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun di Pematang Raya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak yang dirasakan masyarakat selain pelayanan pemerintahan juga *multiplier effect* dari keberadaan Kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap masyarakat sekitarnya. Bentuk *multiplier effect* keberadaan Kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap masyarakat sekitar dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Simalungun umumnya dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kompleks perkantoran pada khususnya. Dengan melihat kondisi keberadaan wilayah di sekitar kompleks perkantoran menunjukkan bahwa beberapa kegiatan ekonomi yang telah berkembang setelah perpindahan kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya antara lain adalah telah berkembang unit-unit usaha percetakan dan penggandaan, jasa perumahan atau rumah-rumah kos, rumah makan, salon dan kecantikan, bengkel, serta jasa-jasa lain yang turut berkembang seiring perkembangan kota Pematang Raya sebagai ibukota Kabupaten Simalungun. Berdasarkan beberapa uraian yang telah diuraikan di atas, penulis merasa penting untuk membahas tentang dampak keberadaan Kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun Pematang Raya terhadap pendapatan usaha kecil serta pola ruang di wilayah sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian ini mengenai dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Maksud dari penelitian ini adalah menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 2008). Adapun metode pengumpulan data dilakukan, yaitu : Wawancara, Studi Dokumen, Penyebaran daftar pertanyaan (Kuesioner). Sedangkan pengolahan data dan proses pengujian statistik diolah dengan menggunakan program SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kecamatan Raya merupakan salah satu dari tiga puluh satu kecamatan di Kabupaten Simalungun dengan ibukota Pernatang Raya. Secara geografis, Kecamatan Raya terletak antara 05° Lintang Utara dan 100° Bujur Timur; dengan luas wilayah 328,5 Km² atau 32850 Ha, berada pada ketinggian rata - rata 900 meter dari permukaan laut (dpl). Kecamatan Raya memiliki batas wilayah yang strategis dengan kecamatan yang ada di kabupaten Simalungun. Bila dirinci batas wilayah Kecamatan Raya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan Raya Kahean Silau Kahean
2. Sebelah Selatan Kecamatan Dolok Pardamean
3. Sebelah Barat Kecamatan Purba
4. Sebelah Timur Kecamatan Panei

Kecamatan Raya merupakan ibu kota kabupaten Simalungun dengan mengacu kepada konsep keadilan dan pemerataan, pemerintah melalui PP No. 70/1999 tanggal 28 Juli 1999, menyetujui pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun. Pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun.

Keputusan tersebut tentu telah mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan daerah Simalungun. Pemindahan daerah ibukota Kabupaten Simalungun tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun (Nomor 4/DPRD/1996) tanggal 8 Oktober 1996 (3 tahun sebelumnya). Perpindahan tersebut dimaksudkan agar dapat dilakukan pembangunan di Daerah Kabupaten Simalungun dengan mengatur tata ruang wilayah. Namun setelah dievaluasi lebih dari satu dekade, pengaturan tata ruang tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun saat ini masih berada dalam wilayah Daerah Kota Pematang Siantar.

Perpindahan ibukota kabupaten bukan sekedar persoalan pusat pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Luas wilayah Kecamatan Raya sebesar 328,50 Km² atau 32.850 Ha.

Penduduk

Penduduk berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk per nagori/Kelurahan di kecamatan Raya tahun 2015 tercatat sebanyak 30 697 jiwa yang terdiri dari laki – laki 15.703 jiwa dan perempuan sebanyak 14.994 jiwa- Kepadatan penduduk rata – rata 117,3 jiwa per km². Penduduk Kecamatan Raya terhimpun kedalam 7.621 kepala keluarga.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Gambaran umum responden mencakup karakteristik individu yaitu usia, pendidikan dan pekerjaan. Untuk lebih memberikan gambaran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Umur responden yang paling banyak adalah pada kelompok umur 19-31 tahun yaitu 52,53%, selanjutnya rentang umur 32- 44 tahun sebanyak 32,32% dan umur 45-57 tahun sebanyak 15,15 %. Ini member' makna bahwa responden yang berperan dalam kegiatan sektor pertanian dan jasa di Kelurahan Pematang Raya, Desa Sondi Raya dan Raya Bayu adalah kelompok umur yang produktif.

Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	19-31	52	52.53
2	32-44	32	32.32
3	45-57	15	15.15
	Jumlah	99	100.0

Sumber Data Primer 2016

Pekerjaan responden mayoritas adalah bertani sebanyak 61,62 %, wiraswasta 24,24 % dan PNS/TNI/POL.RI sebanyak 14,14 % . Jenis pekerjaan utama responden in' memberikan gambaran bahwa masyarakat Kelurahan Pematang Raya, Desa Sondi Raya dan Raya Bayu yang menjadi lokasi penelitian dominan bekerja pada sektor pertanian.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Bertani	61	61.62
2	Wiraswasta	24	24.24
3	PNS/TNI/POLRI	14	14.14
	Jumlah	99	100.0

Sumber : Data Primer 2015

Dari komposisi pendidikan ini terlihat bahwa tingkat pendidikan responden termasuk kategori menengah ditandai dengan Jumlah responder yang tamatan SLTA yang cukup banyak yaitu sebesar 49,49%, selanjutnya tamat SD sebesar 23,23%, tamat SLTP sebesar 21,21% dan tamat Akademi/Sarjana sebesar 6,06 %. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Tamat SD	23	23.23
2	Tamat SMP	21	21.21
3	Tamat SLTA	49	49.49

4	Akademi/Sarjana	6	6.06
	Jumlah	99	100

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan jenis kelamin sebagai responden 67,68 % laki-laki dan 32,32 % perempuan. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Perempuan	67	67.68
2	Laki-Laki	32	32.32
	Jumlah	99	100

Sumber : Data Primer 2016

Analisis Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun, Ditinjau dari Aspek Keterjangkauan Pelayanan, Kecukupan Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan

Untuk melihat dampak relokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun ditinjau berdasarkan aspek keterjangkauan pelayanan (*affordability*), *-kecukupan* pelayanan (*recoverability*), kesesuaian pelayanan (*replicability*), meliputi pelayanan:

- Administrasi kependudukan dan catatan sipil, meliputi : (a) Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), (b) Pengurusan Akte Kelahiran, (c) Pengurusan Kartu Keluarga/RunahTangga, (d) Pengurusan Surat Keterangan lainnya.
- Pelayanan Perizinan, meliputi: (a) Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan (b) Pengurusan IMB (Izin Mendin'kan-Bangunan).
- Pelayanan Tenaga Kerja (Pengurusan Surat Keterangan Pancari Kerja)
- Pelayanan Kesehatan (Pengurusan Surat Keterangan Sehat/Sakit)

Sedangkan untuk melihat dampak relokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun ditinjau dari aspek pendapatan masyarakat dilihat berdasarkan (pendapatan rumah tangga) dan dari aspek lapangan kerja dilihat berdasarkan (jumlah anggota keluarga yang bekerja dan jenis pekerjaan/lapangan kerja dari anggota keluarga yang bekerja) terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian dampak relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap Pengembangan Wilayah berdasarkan pelayanan administrasi dengan uraian sebagai berikut:

a. Keterjangkauan Pelayanan (*affordability*)

Aspek keterjangkauan pelayanan dalam pengurusan meliputi- waktu yang dibutuhkan, biaya pengurusan serta kesesuaian biaya dengan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama waktu pengurusan sebelum relokasi sebagian besar responden menyatakan > 15 baik, yaitu 61 orang (64,9%), setelah relokasi juga sebagian besar responden menyatakan > 15 -hari, yaitu 64 orang (68,1%). Biaya pengurusan sebelum relokasi sebagian besar responden menyatakan > Rp-30.000, yaitu 56 orang (59,6%), dan setelah relokasi sebagian besar responden juga menyatakan biaya pengurusan sebesar > Rp.30.000, yaitu 52 orang (55,3%). Kesesuaian biaya pengurusan sebelum relokasi menurut sebagian besar responden menyatakan lebih mahal dan yang ditetapkan, yaitu 62 orang (66,0%), setelah

relokasi juga sebagian besar responden menyatakan lebih mahal dari yang ditetapkan, yaitu 59 orang (62,8%). Keterjangkauan pelayanan dalam pengurusan sebelum dan setelah relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Keterjangkauan Pelayanan &Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun

No	Jawaban	Sebelum		Setelah	
		F	%	F	%
1	Sangat baik	23	23.23	23	23.23
2	Baik	37	37.37	47	47.47
3	Biasa Saja	28	28.28	18	18.18
4	Kurang Baik	8	8.08	8	8.08
5	Tidak Baik	3	3.03	3	3.03
Jumlah		99	100	99	100

Sumber: Data Primer, 2016

b. Kecukupan pelayanan (*recoverability*)

Aspek kecukupan. pelayanan dalam pengurusan meliputi dinas teknis melayani, pelayanan petugas, kesopanan petugas serta kenyamanan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dings yang melayani pengurusan sebelum relokasi, yaitu 73 orang (77,7%), setelah relokasi juga sebagian besar responden menyatakan Dinas Teknis, yaitu 72 orang (76,6%).

Pelayanan petugas dalam pengurusan sebelum relokasi, sebagian besar responden menyatakan lambat, yaitu 56 orang (59,6%), demikian juga setelah relokasi sebagian besar responden menyatakan pelayanan petugas lambat, yaitu 57 orang (60,6%). Kesopanan petugas saat pengurusan sebelum maupun setelah relokasi menurut sebagian besar responden adalah sopan, yaitu 38 orang (40,4%)- Kenyamanan lingkungan pelayanan sebelum relokasi menurut sebagian besar responden adalah tidak nyaman, yaitu 56 orang (59,6%), setelah relokasi juga sebagian besar responden menyatakan nyaman lingkungan nyaman, yaitu 53 orang (56,4%), seperti pada. Tabel 6

Tabel 6. Kecukupan Pelayanan dan Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun

No	Jawaban	Sebelum		Setelah	
		F	%	F	%
1	Sangat Sopan	11	11.11	11	11.11
2	Sopan	12	12.12	32	32.32
3	Biasa Saja	53	53.54	33	33.33
4	Kurang Sopan	18	18.18	18	18.18
5	Tidak Sopan	5	5.05	5	5.05
Jumlah		99	100	99	100

Sumber: Data Primer, 2016

c. Kesesuaian pelayanan

Aspek kesesuaian pelayanan dalam pengurusan meliputi: prosedur pengurusan, persyaratan yang dibutuhkan, penjelasan petugas dan kedisiplinan petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan prosedur pelayanan sebelum relokasi melalui perantara, yaitu 56 orang (59,6%), setelah relokasi Juga sebagian besar responden menyatakan melalui perantara, yaitu 51 orang (54,3%). Persyaratan dalam pengurusan sebelum relokasi, sebagian besar responden menyatakan administrasi tidak terbuka, yaitu 49 orang (52,12%), namun setelah relokasi sebagian besar responden menyatakan administrasi terbuka, yaitu 56 orang (59,6%). Penjelasan petugas saat pengurusan sebelum, maupun setelah relokasi menurut sebagian besar responden adalah jelas, yaitu 38

orang (40,4%). Kedisiplinan petugas dalam pengurusan sebelum maupun setelah relokasi menurut sebagian besar responden tidak tepat waktu, yaitu. 60 orang (63,8%) sebelum relokasi dan 56 orang (59,6%) setelah relokasi seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Kesesuaian Pelayanan dalam Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun

No	Jawaban	Sebelum		Setelah	
		F	%	F	%
1	Sangat Displin	11	11.11	11	11.11
2	Displin	12	12.12	32	32.32
3	Biasa Saja	53	53.54	33	33.33
4	Kurang Displin	18	18.18	18	18.18
5	Tidak Displin	5	5.05	5	5.05
Jumlah		99	100	99	100

Sumber: Data Primer, 2016

Menurut (Rahman, 2002), salah satu katagori organisasi berdasarkan tugas pokok atau mist adalah birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah *service* (pelayanan) langsung kepada masyarakat. Kualitas birokrasi pelayanan yang ingin dicapai melalui pengaturan struktur-tural seperti hirarki kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, tata kerja, dan sistem pengupahan yang kesemuanya berlandaskan peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut, sering dianggap terlampau ideal, karena sering muncul pertanyaan apakah mungkin sosok birokrasi yang demikian dapat sepenuhnya terwujud, karena ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya peraturan perundang-undangan, institusi, pemberdayaan dan juga mentalitas masyarakat.

Hasil uji statistik *t-test* menunjukkan tingkat perbedaan yang nyata variabel ketedangkauan ($t - \text{hitung} = 2.636$), variabel kecukupan ($t - \text{hitung} = 5.086$) dan variabel kesesuaian ($t - \text{hitung} = 5.489$) lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 1,986$, artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan keterjangkauan pelayanan (*affordability*), kecukupan pelayanan (*recoverability*) dan kesesuaian pelayanan (*replicability*) sebelum dan setelah relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun dalam pelayanan pengurusan dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 variabel keterjangkauan, 0,000 variabel kecukupan dan 0,000 variabel kesesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun memberi dampak terhadap kualitas pelayanan publik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel. 8. Perbedaan Keterjangkauan Pelayanan (*Affordability*), Kecukupan Pelayanan (*Recoverability*) dan Kesesuaian Pelayanan (*Replicability*) Pelayanan Pengurusan Sebelum dan Setelah Relokasi

Pelayanan Pengurusan	Keterjangkauan	Kecukupan	Kesesuaian
Sebelum Relokasi	2,79	1,49	1,97
Setelah Relokasi	2,94	1,81	2,21
Perbedaan rata-rata	0,15	0,32	0,24
Signifikansi	0,010	0,000	0,000
t-hitung	2,636	5,086	5,489
t-Uji	1,986	1,986	1,986

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2016

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 145 siswa di Kecamatan Raya, menunjukkan seberapa besar hubungan antara pekerjaan orangtua, penghasilan orangtua, tanggungan orang tua, jarak tempat tinggal, waktu tempuh ke sekolah, dan fasilitas sekolah terhadap minat siswa dalam memilih sekolah atau program studi pilihan.

PEMBAHASAN

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Simalungun secara khusus dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat–pusat permukiman sesuai dengan heirarki dan fungsinya untuk mengembangkan wilayah secara terintegrasi dengan cara memacu pengembangan terbentuknya kota–kota di pusat perdesaan serta membentuk struktur kegiatan perkotaan. Strategi pengembangan struktur ruang wilayah dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas wilayah dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terutama untuk kegiatan pertanian, perdagangan, jasa dan industri yang mendukung kegiatan pertanian.

Strategi pengembangan sistem perdesaan dapat dilakukan dengan cara :

Memperlakukan sistem perdesaan sebagai hinterland dalam sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Sebagai upaya pengintegrasian sistem perdesaan ke dalam sistem perwilayahan Kabupaten Simalungun agar tercipta interaksi desa-kota yang harmonis, yang dicerminkan dari berfungsinya pusat-pusat perdesaan dalam suatu kesatuan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Simalungun. Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pertanian perkebunan, rakyat , hortikultura dan sawah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Provinsi Sumatera Utara, untuk Kabupaten Simalungun PDRB menurut harga konstan secara agregat terjadi perubahan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.729.450.330.000 naik menjadi Rp. 2.893.427.210.000 di tahun 2009 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 163.976.880.000 atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,01 % laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,69 % dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang mencapai sebesar 4,71 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yakni mencapai 8,22 %, hal ini didorong oleh kebijaksanaan pemerintah pusat dalam menaikkan belanja pegawai yang berdampak pada kenaikan subsektor pemerintahan dan pertahanan disusul kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yakni sebesar 7,04 %. Sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 5,06 % yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 6,88 %, kondisi ini sebagai akibat dari pengaruh krisis global yang berdampak pada sektor industri khususnya industri yang memiliki pasar luar negeri karena mengalami penurunan permintaan, disamping itu juga area pasar bebas kawasan ASEAN dengan negara China yang sudah berlaku sehingga berbagai jenis produk dengan harga yang murah dari luar negeri bebas memasuki pasar regional maupun nasional, sehingga produk nasional yang tidak siap bersaing tentu saja akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan laju pertumbuhan perekonomian pada tahun 2009 atau besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Simalungun secara agregat adalah mencapai sebesar Rp. 5.871.144.810.000,- yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan

tahun 2008 yang mencapai sebesar Rp. 5.170.914.120.000,- sehingga terjadi kenaikan sebesar 13,54 % atau secara agregat naik sebesar Rp. 700.230.690.000,- Kenaikan tersebut lebih didorong oleh naiknya harga barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2008 sebesar 14,59 % maka pertumbuhan tahun 2009 relatif lebih kecil. Pada umumnya laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa, hal ini dapat terlihat dari besaran angka inflasi PDRB pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 7,11 %. Pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 17,53 % , selanjutnya pada urutan kedua pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor pertanian yakni sebesar 14,22 % hal ini disebabkan oleh banyaknya warga Kabupaten Simalungun yang merantau baik secara individu, keluarga ataupun kelompok manajemen yang bersama-sama untuk berjualan barang - barang lokal terutama kosmetik, peralatan dapur produk kabupaten Simalungun maupun pakaian jadi lebih spesifik lagi berjualan batik antar pulau dengan tujuan utama adalah daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Irian maupun Timor Leste, setiap barang dagangan habis mereka pulang sambil berbelanja dan menginvestasikan uangnya di Kabupaten Simalungun ataupun menjadi tenaga kerja di luar negeri terutama di Arab Saudi, Taiwan, Singapura dan Malaysia yang selalu mengirimkan uangnya ke tanah air serta jika dilihat dari sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang mayoritas lahannya digunakan untuk pertanian produksi padinya selalu surplus sehingga merupakan lumbung padi bagi Sumatera Utara, maupun nasional, pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 10,35 %. Karena pada umumnya industri yang berkembang di Kabupaten Simalungun adalah industri agroindustri.

Pengelompokan sektor yang lain adalah pengelompokan yang didasarkan atas output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor ekonomi, yaitu sektor primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, sektor sekunder yakni jika input berasal langsung dari sektor primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan sektor tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

- a) Kelompok primer : Sektor pertanian dan pertambangan/penggalian
- b) Kelompok sekunder : Sektor industri, listrik / gas dan air bersih, bangunan /kontruksi.
- c) Kelompok tertier : Sektor perdagangan, pengangkutan/komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, pemerintahan umum/hankam dan jasa - jasa.

Faktor aksesibilitas akan berpengaruh besar kepada berbagai sektor kegiatan baik ekonomi maupun sosial karena akan menentukan tingkat kemudahan dan kelancaran pergerakan orang dan barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk itu, pertimbangan aksesibilitas dalam setiap keputusan lokasi suatu kegiatan akan menjadi mutlak karena akan sangat berdampak kepada operasional dari kegiatan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis/penilaian terhadap jarak terjauh yang dilayani oleh pusat pelayanan yaitu Kabupaten Simalungun terhadap masing-masing ibukota kecamatan sebagai fungsi pusat pelayanan masyarakat sejauh 103 kilometer yaitu kecamatan Ujung Padang sedangkan yang terdekat Kecamatan Purba sejauh 13 kilometer hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan optimal tidaknya suatu ibukota dari suatu wilayah administrasi pemerintahan dengan menggunakan jarak antar ibukota kecamatan.

Kota ini sebagai pusat pelayanan bagi daerah hinterland kabupaten Simalungun, sehingga relatif berkembang lebih cepat daripada subwilayah yang berada di pedalaman atau tidak dilewati jalur lintas utama tersebut dalam hal ini jarak jangkauan pelayanan yang biasa ditempuh dari Kecamatan Pamatang Raya Ke Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Simalungun.

Secara teoritis jalan utama yang menghubungkan Raya dengan Wilayah sekitar dapat dikategorikan ke dalam jalan Propinsi yang artinya segala pengelolaan jalan menjadi kewenangan Propinsi. Tipe jalan propinsi ini relatif baik untuk pengembangan wilayah pada daerah yang cukup luas, yang kemudian saling dihubungkan oleh jalan kolektor primer dan jalan lokal primer lainnya hanya saja, kualitas jaringan jalan tersebut saat ini sebagian berada dalam kondisi sedang dan rusak ringan dengan akses dan orientasi pergerakan melintasi wilayah Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Karo, Dairi dan Pak Pak barat melewati Kecamatan Raya, sedangkan jalan lokal primer kondisinya belum memungkinkan untuk transportasi kendaraan besar dengan intensitas yang padat akibatnya ialah sangat terbatasnya dukungan jaringan jalan alternatif bagi aktivitas penduduk di Kecamatan Raya . Oleh karena itu, umumnya pergerakan orang, barang, dan jasa di Kecamatan Raya tetap saja memanfaatkan jaringan jalan utama yang sudah ada dengan memperhatikan faktor kedekatan jarak.

Namun jika dicermati lebih jauh, sebenarnya dengan keberadaan jaringan jalan alternatif yang tersebar sekitar kecamatan Raya serta rencana pembuatan jalur lingkaran maka sangat terbuka harapan di masa yang akan datang untuk menjadikan Kecamatan Raya sebagai daerah transit maupun perlintasan utama dari berbagai route perjalanan dengan cara atau kebijakan meningkatkan tipe perkerasan jalur jalan-jalan alternatif, disamping memperbaiki kondisi ruas jalan utama saat ini, sehingga pola jaringan jalan lingkaran dalam Kecamatan Raya perlu diperhatikan.

Dampak dari banyaknya permukiman baru akan memberi akibat relokasi dan tentunya akan membawa bangkitan ekonomi baru bagi wilayah penelitian karena akan terjadi peningkatan permintaan akan kebutuhan-kebutuhan primair, sekundair maupun tersier hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya mini market, ruko, rumah makan, tempat- tempat hiburan dan wisata serta lain sebagainya. Berdasarkan temuan hasil analisis dalam penelitian ini, jelaslah bahwa Pamatang Raya yang menjadi pusat pelayanan administratif wilayah Kabupaten Simalungun di bagian Barat sangat representatif mewakili kondisi utara bengkawan yang memang kurang potensial untuk dikembangkan, karena keterbatasan sumber daya alam walaupun berdasarkan penilaian analisis di atas secara agregat, kecamatan ini masih kalah jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya Berarti secara ruang wilayah Kecamatan Pamatang Raya mempunyai hirarki kota berupa ordo II berada dibawah Kota Pematangsiantar yang berordo I, dengan demikian Kecamatan Pamatang raya dapat ditetapkan sebagai hinterland bagi Kabupaten Simalungun dalam satu Bagian Wilayah Kota (BWK) berdampingan dengan Kecamatan Panei, Kecamatan Purba, Kecamatan Raya kahean, Kecamatan Dolok Pardamean, yang mana kecamatan-kecamatan tersebut dapat menjadi hinterland bagi Kecamatan Pamatang raya. diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dari daerah-daerah lain yang merupakan daerah perbatasan karena memang letak bagian wilayah kota ini berpusat di Pamatang raya dan berbatasan dengan kabupaten tetangga atau dalam bahasa perencanaan dikatakan hinterland dari Kecamatan

Pamatang raya adalah daerah perbatasan.

Selanjutnya, mengingat semua data yang digunakan dalam analisis yang telah dilakukan adalah data kecamatan, bukan khusus data ibukota kecamatannya saja, maka penentuan apakah pusat pelayanan masyarakat ditetapkan hanya di kabupaten Simalungun saja atau mulai dibuka beberapa akses pelayanan di Kecamatan Pamatang raya mengingat jarak antara Kabupaten Simalungun dengan Kecamatan Pamatang raya relatif jauh. Di sini, terhadap Kecamatan Pamatang raya yang terpilih sebagai lokasi optimal pusat pelayanan masyarakat di sebelah utara Kabupaten Simalungun perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian kota alternatif ataupun revisi penyusunan tata ruang wilayah yang lebih komprehensif mengingat kedudukan Pamatang Raya secara geografis letak lokasi tersebut bersebelahan satu dengan yang lain. Sehingga kajian yang agak melebar atau agak sedikit regional perlu segera ditindaklanjuti dengan tata ruang kawasan atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau lebih spesifik lagi. Menjadi lebih luas lingkungannya dan memberi peluang pengembangan ekonomi wilayahnya ke depan. Posisi strategis Kecamatan Pamatang raya yang berada di perempatan berfungsi sebagai pusat transit karena keberadaannya yang persis terletak pada sumbu utama jalan propinsi yang menghubungkan antar kabupaten perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sektor perdagangan dan jasa serta dimungkinkan untuk menggalang sinergi kebijakan dengan kabupaten tetangga maupun kecamatan tetangga yang secara geografis mempunyai sifat yang 'sama-sama agraris' serta sangat membuka peluang bagi pembentukan kerjasama pengembangan wilayah terpadu dalam suatu kawasan saling terkait dan bersinergi bagi kemajuan bersama. Kerjasama ini sangat mungkin untuk dijajagi dalam perencanaan tata ruang wilayah perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama dengan daerah sekitar

KESIMPULAN

1. Relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun memberi pengaruh terhadap Pelayanan Masyarakat. Dari hasil analisis Chi Square diperoleh hasil adalah variable pelayanan yang paling utama dipengaruhi oleh relokasi di Kecamatan Raya dengan nilai Chi Square 47.367.
2. Jika dilihat dari segi pengembangan wilayah Kabupaten Simalungun yang begitu luas maka relokasi pusat pemerintahan dapat dijadikan sebagai prioritas pada pengembangan wilayah atas Simalungun, karena Kota Raya merupakan pengelompokkan lokasi pengembangan di wilayah atas Simalungun. Namun demikian hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa perencanaan pembangunan pusat pertumbuhan haruslah tetap mengacu kepada standar pengembangan wilayah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiaskiton, M. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68-80.
- Anggraini, T. (2020). Analisis Kinerja Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Relokasi Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Tahun 2016). *Jurnal Wacana Kinerja*, 23(1), 101-118.

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025*. Penerbit : Bappeda Kabupaten Simalungun.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Simalungun Dalam Angka*
- Danil, M. (2016). Analisis Tentang Konsolidasi Tanah pada Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. *Premise Law Journal*, 21, 165034.
- Intan Suswita, Darwin Damanik, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.346>
- Maulana, R. (2019). *Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh (Doctoral dissertation)*.
- Ritonga, J., & Girsang, R. M. (2019). Pengaruh Kreativitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar. *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.36985/manajemen.v1i1.36>
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tarigan, W. J., Girsang, R. M., & Martina, S. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Produktivitas Karyawan PT Astra Honda Pematangsiantar. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 363-371
- Tatang Syahban Adi Syahputra, Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.261>
- Yanti, M. (2022). *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kantor Camat Sekernan Kabupaten Muaro Jambi (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan)*.